

Available online at: ojs.bantulkab.go.id

Bantul

Jurnal Riset Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Kabupaten Bantul

JRD

ISSN: 1412-8519 (media cetak)

ISSN: 2829-2227 (media online)

OPTIMALISASI DANA KEISTIMEWAAN DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDAPATAN DI KABUPATEN BANTUL

Oleh

Yulyana Purwaningsih, SE., M.Si

Perencana Ahli Muda Bappeda Kabupaten Bantul

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

yulyana5379@gmail.com

ABSTRAK

Policy paper ini menganalisis pengelolaan Dana Keistimewaan (Danais) di Kabupaten Bantul, yang saat ini masih berorientasi pada output fisik sehingga kontribusinya terhadap pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terbatas. Studi ini menggunakan pendekatan Results-Based Management (RBM), kriteria evaluasi OECD-DAC, teori keadilan distribusi, pembangunan inklusif, serta analisis regulasi nasional dan daerah sebagai landasan konseptual. Metode yang digunakan meliputi identifikasi masalah berbasis data, analisis penyebab hingga akar masalah, serta evaluasi alternatif kebijakan menggunakan metode Bardach berdasarkan kriteria ekonomi, sosial, politik, dan kelayakan teknis. Temuan utama menunjukkan bahwa kendala utama Danais adalah regulasi dan indikator kinerja yang menekankan serapan anggaran, kapasitas kelembagaan yang terbatas, koordinasi lintas perangkat daerah yang belum optimal, serta sistem monitoring dan evaluasi yang belum berbasis data mikro-spasial. Berdasarkan evaluasi, **rekomendasi kebijakan yang paling efektif adalah pembangunan sistem monitoring dan evaluasi Danais berbasis mikro-spasial dengan indikator *outcome-impact*, mekanisme *feedback loop*, dan integrasi data lintas perangkat daerah**, yang akan meningkatkan transparansi, partisipasi publik, dan efektivitas program untuk mendorong pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Keywords : Dana Keistimewaan (Danais), Results-Based Management (RBM), Outcome-Impact, Monitoring Mikro-Spasial, Pemerataan Pendapatan

I. PENDAHULUAN

Dana Keistimewaan (Danais) merupakan instrumen fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Dana ini ditujukan untuk mendukung urusan keistimewaan, khususnya pada aspek tata ruang, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata cara pengisian jabatan Gubernur/Wakil Gubernur (Kementerian Keuangan, 2023).

Sejak tahun 2013, alokasi Danais terus meningkat, dengan Kabupaten Bantul menjadi salah satu penerima signifikan mengingat posisinya sebagai wilayah penyangga Kota Yogyakarta serta basis pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata, dan sektor padat karya. Danais digunakan untuk berbagai program pembangunan fisik maupun non-fisik, mulai dari infrastruktur desa, revitalisasi budaya, hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, evaluasi terakhir menunjukkan bahwa pengelolaan Danais masih lebih berfokus pada output fisik dan serapan anggaran, sementara kontribusinya terhadap pemerataan pendapatan, pengurangan kesenjangan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

belum optimal (Bappeda DIY, 2022; BPK RI, 2021).

Kondisi ini menekankan perlunya reformasi tata kelola Danais berbasis hasil (results-based) dengan indikator outcome—impact, mekanisme integrasi data penerima manfaat lintas perangkat daerah, dan sistem monitoring berbasis data mikro-spasial, agar alokasi dana tidak hanya memenuhi kewajiban administratif tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan..

Namun demikian, sejumlah kajian menunjukkan bahwa efektivitas Danais dalam mendorong pemerataan pendapatan masih terbatas. Evaluasi yang ada lebih menekankan pada output fisik dan aspek administratif, seperti serapan anggaran dan kepatuhan prosedural, sementara pengukuran terhadap outcome dan impact, misalnya penurunan ketimpangan pendapatan, peningkatan produktivitas masyarakat lokal, atau penguatan kapasitas ekonomi masyarakat miskin, masih minim (OECD-DAC, 2019; Bappenas, 2021). Kondisi ini berpotensi mengurangi relevansi Danais terhadap misi pembangunan inklusif, yang menekankan pemerataan kesejahteraan, pengurangan kesenjangan, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Secara konteks, Kabupaten Bantul menghadapi sejumlah tantangan struktural yang mempengaruhi efektivitas Danais sebagai berikut:

Ketimpangan pendapatan antarwilayah, di Kabupaten Bantul tercermin dari Gini Ratio tahun 2022 sebesar 0,388, yang lebih tinggi dibanding rata-rata DIY (BPS DIY, 2023). Hal ini menunjukkan adanya konsentrasi ekonomi dan akses sumber daya yang belum merata. Misalnya, sebagian besar pendapatan tinggi terkonsentrasi di kecamatan pusat seperti Bantul dan Sewon, dengan adanya usaha pariwisata, ekonomi kreatif, dan sektor jasa yang berkembang pesat. Sementara di wilayah pinggiran atau pedesaan seperti Pajangan dan Pleret, masyarakat lebih banyak bergantung pada pertanian subsisten dan UMKM kecil dengan keterbatasan akses modal, pasar, dan infrastruktur. Kondisi ini menunjukkan bahwa program Dana Keistimewaan (Danais) harus diarahkan untuk memperbaiki distribusi manfaat, misalnya dengan memberikan dukungan yang lebih besar untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah yang kurang berkembang agar kesenjangan pendapatan berkurang

Keterbatasan lapangan kerja produktif, di Kabupaten Bantul ditandai dengan dominasi sektor informal sebesar 64% dari

total angkatan kerja (Disnakertrans DIY, 2022). Banyak pekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, buruh harian, dan pekerja UMKM kecil, menghadapi pendapatan yang tidak stabil, akses modal terbatas, serta minimnya jaminan sosial atau perlindungan hukum. Kondisi ini menimbulkan risiko rendahnya penyerapan manfaat Dana Keistimewaan (Danais), karena alokasi dana yang lebih banyak berfokus pada proyek fisik dan infrastruktur tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang bekerja di sektor informal. Akibatnya, tujuan Danais untuk mendukung pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan menjadi kurang optimal. Kondisi ini menekankan urgensi perlunya perencanaan Danais yang berbasis outcome dan data mikro-spasial, sehingga intervensi dapat diarahkan langsung ke sektor-sektor produktif yang memiliki potensi terbesar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan rentan. Kapasitas kelembagaan, tercermin dari rendahnya koordinasi antar-perangkat daerah, perencanaan yang masih berorientasi pada output fisik, serta sistem monitoring dan evaluasi yang belum berbasis data mikro-spasial (Bappeda Bantul, 2022). Akibatnya, informasi tentang penerima manfaat Danais, distribusi dana, dan dampak terhadap

kesejahteraan masyarakat sulit diperoleh secara akurat dan real time. Kondisi ini menimbulkan kesulitan dalam menilai sejauh mana Danais benar-benar memberikan kontribusi bagi kelompok miskin dan rentan, serta menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan kebijakan secara cepat dan tepat sasaran. Urgensinya terletak pada perlunya penguatan kapasitas kelembagaan melalui integrasi data, pelatihan SDM, dan mekanisme feedback loop, agar setiap rupiah Danais dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keberlanjutan fiskal, menjadi tantangan penting dalam pengelolaan Danais, karena alokasi dana yang hanya difokuskan pada proyek jangka pendek atau fisik cenderung memberikan dampak sementara bagi masyarakat (World Bank, 2020). Tanpa perencanaan yang berkelanjutan, manfaat Danais tidak terintegrasi dengan strategi pembangunan jangka menengah maupun panjang, sehingga kontribusinya terhadap penguatan basis ekonomi local seperti peningkatan produktivitas UMKM, pengembangan sektor padat karya, atau akses modal bagi kelompok miskin menjadi terbatas. Kondisi ini menegaskan urgensi perlunya pendekatan pengelolaan

Danais berbasis hasil (results-based), dengan indikator outcome–impact dan mekanisme monitoring berbasis data mikro-spasial, agar investasi Danais dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Evaluasi mikro dan analisis dampak Danais menjadi kebutuhan strategis karena memungkinkan identifikasi penerima manfaat secara tepat, termasuk kelompok rentan, serta menilai sejauh mana program berkontribusi pada pemerataan pendapatan di Kabupaten Bantul (Ravallion, 2016). Pendekatan berbasis data rumah tangga dan spasial ini memungkinkan pemetaan distribusi manfaat, pengukuran outcome dan impact, serta identifikasi kesenjangan yang masih terjadi. Dengan demikian, evaluasi mikro tidak hanya menilai pencapaian output fisik, tetapi juga dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Urgensi pembahasan tema ini terletak pada kemampuan pendekatan mikro untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, selaras dengan prinsip Results-Based Management (RBM) yang menekankan siklus input–output–outcome–impact serta mekanisme feedback loop kebijakan (UNDP, 2009).

Tanpa evaluasi mikro dan analisis dampak yang terintegrasi, Danais berisiko hanya menjadi alokasi anggaran administratif tanpa kontribusi signifikan terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan ini penting untuk merumuskan strategi pengelolaan Danais yang lebih efektif, akuntabel, dan inklusif.

Dengan demikian, topik ini mendesak untuk dibahas karena Danais di Kabupaten Bantul memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Tanpa pengelolaan berbasis hasil dan evaluasi yang tepat, Danais berisiko hanya menjadi instrumen administratif yang menekankan serapan anggaran dan output fisik, tanpa memberikan kontribusi nyata terhadap pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tantangan struktural di Bantul, termasuk ketimpangan pendapatan antarwilayah, dominasi sektor informal, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan kebutuhan keberlanjutan fiskal.

Oleh karena itu, masalah utama yang perlu diselesaikan adalah bagaimana membangun tata kelola Danais di Kabupaten Bantul yang berbasis hasil (results-based), dengan indikator outcome–impact, sistem monitoring berbasis data mikro-spasial, dan

mekanisme feedback loop, karena orientasi Danais yang masih fokus pada output fisik menyebabkan rendahnya kontribusi terhadap pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Danais tidak lagi hanya berorientasi pada serapan anggaran, tetapi benar-benar memberikan kontribusi terhadap pemerataan pendapatan, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan prioritas pembangunan.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang, terdapat sejumlah permasalahan utama dalam implementasi Danais di Kabupaten Bantul, yaitu:

Orientasi pemanfaatan Danais masih berfokus pada output fisik (BPK RI, 2021). Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa sebagian besar program Danais masih diukur berdasarkan capaian fisik dan serapan anggaran, sementara pengukuran terhadap outcome, seperti peningkatan kesejahteraan penerima manfaat atau pemerataan pendapatan, belum dilakukan secara sistematis (BPK RI, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II, 2021). Hal ini membuat kontribusi Danais terhadap tujuan pembangunan inklusif kurang optimal.

Selain itu, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar perangkat daerah memperparah situasi ini, karena perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program belum sepenuhnya terintegrasi. Kurangnya mekanisme feedback loop juga membuat perbaikan program sulit dilakukan secara cepat, sehingga potensi Danais untuk mendukung penguatan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak maksimal. Kekurangan data mikro-spasial semakin membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam menargetkan bantuan secara tepat dan mengukur distribusi manfaat secara akurat.

Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Bantul masih tinggi (BPS DIY, 2023).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Gini Ratio Kabupaten Bantul pada tahun 2022 mencapai 0,388, lebih tinggi dibandingkan rata-rata DIY sebesar 0,374 (BPS DIY, 2023). Fakta ini menegaskan bahwa program-program yang dibiayai Danais belum memberikan dampak signifikan dalam mengurangi disparitas pendapatan antarwilayah maupun antar kelompok masyarakat. Kondisi ini menjadi indikasi bahwa penggunaan Danais selama ini lebih berorientasi pada serapan anggaran dan capaian fisik, sehingga pengaruhnya

terhadap pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat masih terbatas.

Selain itu, tingginya Gini Ratio juga mencerminkan perlunya perbaikan sistem perencanaan dan monitoring Danais agar dapat lebih tepat sasaran. Dengan ketersediaan data mikro-spasial yang memadai dan indikator outcome yang jelas, program Danais dapat lebih efektif dalam menargetkan kelompok yang rentan, mengurangi kesenjangan, dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Hal ini menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan berbasis hasil, kapasitas kelembagaan, dan mekanisme evaluasi yang sistematis.

Rendahnya kapasitas kelembagaan dan sistem monitoring Danais berbasis data mikro (Bappeda Bantul, 2022).

Laporan Bappeda Bantul (2022) menyebutkan bahwa evaluasi Danais selama ini masih bersifat administratif dan agregatif, tanpa dukungan data spasial maupun data rumah tangga. Akibatnya, sulit untuk memastikan apakah kelompok miskin, rentan, dan wilayah dengan ketimpangan tinggi benar-benar menjadi penerima manfaat utama. Kondisi ini menunjukkan rendahnya kapasitas kelembagaan dalam mengelola, memantau,

dan mengevaluasi program secara berbasis bukti.

Selain itu, ketidaktersediaan data mikro-spasial juga menghambat kemampuan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara spesifik. Tanpa mekanisme monitoring berbasis data dan feedback loop, risiko kesalahan alokasi tetap tinggi, sehingga potensi Danais untuk mendorong pemerataan pendapatan dan penguatan ekonomi lokal menjadi terbatas. Hal ini memperkuat urgensi reformasi tata kelola Danais yang berbasis hasil dan didukung sistem monitoring yang komprehensif.

Untuk memperoleh fokus kebijakan yang lebih tajam, tiga masalah yang telah teridentifikasi dalam pengelolaan Danais di Kabupaten Bantul perlu diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi, keseriusan dampak, dan potensi perkembangan masalah ke depan. Penentuan prioritas masalah tidak dapat dilakukan secara subjektif, melainkan memerlukan metode yang terukur. Salah satu metode yang umum digunakan dalam analisis kebijakan adalah metode skoring USG (Urgency, Seriousness, Growth), yang menilai sejauh mana masalah tersebut mendesak untuk ditangani, seberapa serius konsekuensinya bagi pembangunan, serta seberapa cepat masalah akan memburuk jika tidak segera

diatasi (Nugroho, 2014). Dengan menggunakan pendekatan ini, setiap masalah akan diberikan skor numerik oleh responden yang terdiri dari: Perwakilan Kepala Seksi Perencanaan PD pengampu Danais, Perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, Organisasi masyarakat atau forum warga yang terlibat dalam pengawasan anggaran publik, dan Perencana Bidang Pengendalian Bappeda Kabupaten Bantul pada tahun 2024, sehingga dapat diketahui masalah mana yang paling layak diprioritaskan untuk diselesaikan seperti berikut:

Tabel Penilaian USG Masalah Danais di Bantul

No	Masalah	Urgency (U)	Seriousness (S)
		Growth (G)	Total Skor
1	Orientasi Danais masih fokus output	5	5
		5	15
2	Ketimpangan pendapatan masih tinggi	5	4
		5	13
3	Rendahnya kapasitas kelembagaan dan sistem monitoring Danais berbasis data mikro	4	4
		3	11

Orientasi Danais di Kabupaten Bantul masih berfokus pada output fisik akibat regulasi teknis yang menekankan serapan anggaran, lemahnya koordinasi lintas perangkat daerah, serta belum adanya sistem monitoring berbasis hasil. Kondisi ini membatasi efektivitas Danais dalam

mendorong pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lebih rinci penyebab mendasar hal tersebut yaitu:

- 1a. Indikator keberhasilan Danais lebih banyak diukur dari serapan anggaran dan capaian fisik, bukan dari outcome kesejahteraan (BPK RI, 2021).
 - 1b. Dokumen perencanaan Danais belum menetapkan indikator kinerja berbasis hasil (outcome–impact), sehingga sulit menilai kontribusinya pada pemerataan pendapatan (Bappeda DIY, 2022).
 - 1c. Sistem monitoring dan evaluasi Danais masih berbasis laporan administratif, belum menggunakan data mikro rumah tangga maupun spasial (Bappeda Bantul, 2022).
- Faktor-faktor pada level ini kemudian diperkuat oleh penyebab lain yang lebih kompleks seperti:
- 2a. Kapasitas SDM pengelola Danais masih terbatas dalam menyusun indikator berbasis outcome dan impact (BPSDM Kemendagri, 2021).
 - 2b. Koordinasi lintas perangkat daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan Danais belum optimal, sehingga program cenderung terfragmentasi (Bappeda Bantul, 2022).
 - 2c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem monitoring dan evaluasi Danais masih rendah, sehingga data real-time dan spasial sulit diperoleh (OECD, 2019).
 - 2d. Mekanisme feedback loop dari hasil evaluasi belum terintegrasi ke dalam perencanaan berikutnya, sehingga kebijakan berjalan tanpa koreksi berbasis bukti (UNDP, 2009).
 - 2e. Regulasi teknis terkait pengelolaan Danais masih lebih menekankan pada aspek kepatuhan administrasi dibandingkan capaian hasil pembangunan (Kemenkeu, 2023).
 - 2f. Keterbatasan integrasi Danais dengan program pembangunan daerah lain membuat dampak ekonomi dan sosialnya tidak maksimal (Bappenas, 2021).
 - 2g. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi Danais masih rendah, sehingga kebutuhan kelompok miskin dan rentan belum sepenuhnya terakomodasi (Bappeda DIY, 2022).
 - 2h. Ketergantungan tinggi terhadap Danais sebagai sumber pendanaan utama menyebabkan pemerintah daerah cenderung fokus pada penyerapan, bukan keberlanjutan dampak (World Bank, 2020).

Permasalahan tersebut pada akhirnya berakar pada tiga hal sebagai berikut:

- 1) Dominannya output fisik dalam pemanfaatan Danais (BPK RI, 2021; Kemenkeu, 2023).
- 2) Terbatasnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi PD (Bappeda Bantul, 2022; Bappenas, 2021).
- 3) Kurangnya monitoring berbasis data mikro-spasial. (Bappeda DIY, 2022; OECD, 2019; UNDP, 2009).

Berdasarkan akar masalah tersebut, maka problem statemen dalam policy paper ini adalah rendahnya orientasi berbasis hasil (*results-based*) dalam tata kelola Danais, yang disebabkan oleh regulasi dan budaya birokrasi yang *output-oriented*, kelembagaan yang lemah, serta sistem monitoring dan evaluasi yang belum efektif.

II. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Permasalahan utama dalam pengelolaan Danais di Kabupaten Bantul terletak pada orientasi tata kelola yang masih berfokus pada *output* fisik ketimbang *outcome* kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini diperparah oleh regulasi teknis dan indikator kinerja yang menekankan serapan anggaran, lemahnya kapasitas kelembagaan lintas perangkat daerah, serta keterbatasan sistem monitoring berbasis data mikro-spasial yang mampu memotret distribusi manfaat

secara adil. Dengan demikian, meskipun Danais terealisasi secara administratif, kontribusinya terhadap pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap terbatas. Analisis ini bertujuan membedah akar persoalan tersebut untuk merumuskan beberapa alternatif solusi yang logis, terukur, dan dapat diimplementasikan, sehingga Danais dapat bergeser dari sekadar instrumen administratif menjadi instrumen kebijakan yang berdaya ungkit dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkeadilan.

Dukungan Teori/Konsep/Kebijakan/Peraturan yang akan digunakan dalam membedah setiap permasalahan Danais di Kabupaten Bantul akan menggunakan:

- 1) Konsep *Results-Based Management* (RBM)

menekankan pentingnya perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan atau program publik yang berfokus pada pencapaian hasil (*results*), bukan sekadar kegiatan atau output. Dalam konteks Danais di Kabupaten Bantul, RBM membantu memastikan bahwa setiap tahap pengelolaan dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi didesain untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,

khususnya kelompok miskin dan rentan.

Indikator kinerja disusun secara berjenjang: *input* (sumber daya yang digunakan), *output* (produk atau layanan yang dihasilkan), *outcome* (perubahan langsung yang dirasakan masyarakat), hingga *impact* (dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan dan pemerataan pendapatan). RBM juga menekankan mekanisme *feedback loop*, di mana data hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk menyesuaikan kebijakan secara berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, pengelolaan Danais dapat menggeser orientasi dari sekadar serapan anggaran ke pencapaian *outcome–impact*, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas, serta memastikan kontribusi dana terhadap pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan daerah (OECD, 2019; UNDP, 2009).

2) OECD-DAC *Evaluation Criteria*

merupakan standar internasional yang banyak digunakan untuk menilai kualitas dan kinerja program atau kebijakan publik. Kerangka ini menekankan lima kriteria utama yang saling melengkapi:

- a) Relevansi: Menilai sejauh mana program atau kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas penerima manfaat serta kebijakan nasional atau daerah. Dalam konteks Danais, relevansi menilai apakah alokasi dan tujuan Danais benar-benar menjawab kebutuhan kelompok miskin dan rentan di Kabupaten Bantul.
- b) Efektivitas: Mengukur pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi efektivitas membantu menentukan apakah kegiatan dan output Danais secara nyata menghasilkan perubahan positif (*outcome*) dan dampak (*impact*) bagi masyarakat.
- c) Efisiensi: Menilai sejauh mana sumber daya anggaran, waktu, dan tenaga kerja digunakan secara optimal untuk menghasilkan *output* dan *outcome*. Efisiensi penting untuk meminimalkan pemborosan, duplikasi program, dan memastikan Danais memberikan nilai tambah maksimal.
- d) Dampak: Menganalisis konsekuensi jangka panjang dari program terhadap masyarakat, termasuk perubahan kesejahteraan, pemerataan pendapatan, dan inklusi

sosial. Dampak ini mencerminkan kontribusi Danais terhadap tujuan strategis pembangunan daerah.

- e) Keberlanjutan: Menilai kemampuan program untuk mempertahankan hasilnya dalam jangka panjang tanpa bergantung terus-menerus pada dukungan eksternal. Keberlanjutan memastikan manfaat Danais dapat dirasakan secara konsisten oleh masyarakat.

Kerangka OECD-DAC memungkinkan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi kesenjangan antara orientasi output fisik dan pencapaian *outcome–impact*, menilai relevansi intervensi bagi kelompok miskin dan rentan, serta merumuskan alternatif kebijakan berbasis hasil yang meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan Danais di Kabupaten Bantul (OECD, 2019).

3) Teori Keadilan Distribusi (*Distributive Justice Theory*)

menekankan bahwa kebijakan publik harus memastikan distribusi manfaat pembangunan secara adil, terutama bagi kelompok miskin dan rentan. Dalam konteks ini, keadilan distribusi bukan hanya tentang pembagian

sumber daya secara merata, tetapi juga tentang mempertimbangkan kebutuhan, kontribusi, dan kondisi sosial-ekonomi penerima manfaat. (Rawls, 1971). Selain itu, dalam konteks pembangunan dan kebijakan sosial, teori ini juga mengarah pada pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis konteks. Misalnya, studi oleh Sulaiman et al. (2023) menunjukkan bahwa persepsi keadilan distribusi mempengaruhi kinerja karyawan, yang dapat diadaptasi untuk memahami bagaimana masyarakat merasakan keadilan dalam distribusi manfaat kebijakan publik.

Dalam kerangka analisis kebijakan, teori ini memungkinkan evaluasi apakah Danais telah memberikan manfaat yang proporsional kepada masyarakat yang paling membutuhkan, mengurangi kesenjangan pendapatan, dan memperkuat legitimasi sosial program. Selain itu, pendekatan inklusif berbasis konteks (Sulaiman et al., 2023) menekankan pentingnya mengukur persepsi masyarakat terhadap keadilan distribusi, yang dapat menjadi indikator tambahan dalam monitoring dan evaluasi berbasis *outcome–impact*, sehingga reformasi tata kelola Danais dapat

lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

4) Teori Pembangunan Inklusif (*Inclusive Development*)

menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya mencatat peningkatan produk domestik bruto atau output ekonomi secara makro, tetapi harus disertai dengan pemerataan manfaat pembangunan, pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi, dan perlindungan kelompok marjinal atau rentan. Pendekatan ini menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan ekonomi, sosial, dan kelembagaan agar seluruh lapisan masyarakat, terutama yang miskin dan rentan, dapat merasakan dampak positif pembangunan.

Dalam konteks Danais di Kabupaten Bantul, penerapan prinsip pembangunan inklusif berarti bahwa alokasi dan penggunaan Danais harus dirancang tidak hanya untuk memenuhi target output fisik (misal: pembangunan infrastruktur), tetapi juga untuk menghasilkan outcome dan impact yang nyata bagi masyarakat miskin dan rentan. Hal ini mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas perangkat daerah, monitoring berbasis data mikro-

spasial, dan mekanisme *feedback loop*, sehingga distribusi manfaat Danais dapat dipantau dan diperbaiki secara berkelanjutan.

Penerapan teori pembangunan inklusif membantu mengidentifikasi kesenjangan antara output dan outcome, menilai efektivitas program dalam pemerataan pendapatan, serta memberikan landasan normatif bagi perumusan alternatif kebijakan yang dapat meningkatkan akuntabilitas berbasis hasil Danais (World Bank, 2018; UNDP, 2009; OECD, 2019).

5) Teori Governance dan *New Public Management* (NPM)

menekankan prinsip-prinsip tata kelola publik yang efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Konsep governance menekankan pentingnya transparansi, partisipasi masyarakat, koordinasi antar lembaga, dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan publik (Rhodes, 1996). Prinsip-prinsip ini relevan untuk memastikan bahwa pengelolaan Danais tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, *New Public Management* (NPM) menekankan pengelolaan berbasis kinerja dan hasil, mendorong inovasi, efisiensi, serta penggunaan indikator outcome–impact untuk menilai keberhasilan kebijakan (Hood, 1991). Dalam konteks Danais di Kabupaten Bantul, penerapan NPM berarti setiap program atau kegiatan harus memiliki target hasil yang jelas, sistem monitoring yang terintegrasi, dan mekanisme feedback untuk memperbaiki kinerja secara berkelanjutan.

Dengan menggabungkan prinsip *governance* dan NPM, analisis kebijakan Danais dapat menggunakan menilai: apakah tata kelola sudah transparan dan partisipatif, apakah hasil program sesuai tujuan pembangunan, dan sejauh mana koordinasi antar perangkat daerah mendukung pencapaian *outcome* yang berdampak pada pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (OECD, 2019; UNDP, 2009).

- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi dasar hukum utama bagi pengalokasian Danais untuk

mendukung pelaksanaan urusan istimewa, termasuk tata ruang, pertanahan, kebudayaan, pendidikan, dan kelembagaan. UU ini menetapkan kewenangan khusus bagi Pemerintah DIY untuk mengelola sumber daya dan anggaran secara mandiri, termasuk mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan Danais.

Dalam konteks analisis kebijakan, UU ini memberikan kerangka legal untuk menilai: apakah pengelolaan Danais sudah sesuai dengan tujuan strategis keistimewaan, apakah orientasi program lebih menekankan output fisik atau outcome kesejahteraan masyarakat, dan bagaimana regulasi ini memungkinkan integrasi kebijakan lintas perangkat daerah. Dengan memahami ketentuan UU ini, evaluasi Danais dapat mengidentifikasi celah dalam perencanaan berbasis hasil, monitoring, dan akuntabilitas, sehingga reformasi tata kelola dapat diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan dan dampak sosial yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Bantul.

- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

menetapkan kerangka hukum dan mekanisme perencanaan pembangunan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam penggunaan Danais. UU ini menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan, agar alokasi dana daerah selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam konteks analisis kebijakan, UU ini memungkinkan evaluasi apakah Danais telah terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah (RPJMD) dan rencana pembangunan nasional (RPJMN), serta sejauh mana pengelolaan Danais mendorong pencapaian outcome yang berdampak pada pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman UU ini juga penting untuk mengidentifikasi kesenjangan perencanaan berbasis hasil, koordinasi lintas perangkat daerah, dan mekanisme monitoring, sehingga reformasi tata kelola Danais dapat diarahkan untuk efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

8) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024 menjadi kerangka hukum yang mengatur integrasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk pengelolaan Danais. UU ini menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan agar sumber daya yang dialokasikan dapat mendukung pencapaian tujuan nasional dan daerah secara harmonis.

Dalam konteks analisis kebijakan, UU ini memungkinkan evaluasi apakah Danais telah terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah (RKPD) dan nasional (RPJMN), serta sejauh mana penggunaan Danais mampu menghasilkan outcome yang berdampak pada pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pemahaman UU ini, identifikasi kelemahan dalam koordinasi antar perangkat daerah, perencanaan berbasis hasil, dan monitoring berbasis data mikro-spasial dapat dilakukan secara sistematis, sehingga reformasi tata kelola Danais dapat diarahkan untuk efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun program dan kegiatan, termasuk penggunaan Danais, agar selaras dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Peraturan ini menetapkan standar klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur kegiatan dan anggaran, sehingga program Danais dapat terintegrasi dengan dokumen perencanaan seperti RKPD, APBD, dan RPJMN.

Dalam konteks analisis kebijakan, Permendagri ini berfungsi sebagai alat evaluasi apakah perencanaan Danais sudah sistematis, terdokumentasi dengan baik, dan dapat diukur kinerjanya menggunakan indikator *input-output-outcome-impact*. Hal ini penting untuk mengidentifikasi kesenjangan antara orientasi output fisik dan pencapaian outcome kesejahteraan masyarakat, serta untuk merumuskan alternatif kebijakan yang meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan Danais di Kabupaten Bantul.

10) Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Keistimewaan mengatur tata kelola teknis Danais, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana. Namun, regulasi ini lebih menekankan pada aspek administratif dan kepatuhan prosedural daripada pencapaian hasil (*outcome*) pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks analisis kebijakan, Pergub ini berfungsi sebagai dasar untuk mengevaluasi kesenjangan antara orientasi output fisik dan outcome yang diharapkan, serta menilai apakah mekanisme monitoring dan evaluasi sudah cukup untuk memastikan Danais memberi dampak nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan di Kabupaten Bantul. Pemahaman terhadap Pergub ini juga menjadi acuan dalam merumuskan alternatif kebijakan berbasis hasil, integrasi data mikro-spasial, dan feedback loop untuk memperbaiki efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan Danais.

11) Laporan BPK RI (2021) tentang Hasil Pemeriksaan Dana Keistimewaan

mengungkapkan bahwa pengelolaan Danais di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Bantul, masih menunjukkan kelemahan dalam akuntabilitas kinerja, di mana fokus utama lebih pada serapan anggaran daripada pencapaian hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) bagi masyarakat. Temuan ini menyoroti keterbatasan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dapat mengukur kontribusi Danais terhadap pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks analisis kebijakan, laporan BPK ini menyediakan bukti empiris mengenai orientasi pengelolaan Danais yang lebih administratif dan prosedural. Hal ini membantu menilai gap antara regulasi dan praktik, mengidentifikasi penyebab kelemahan akuntabilitas, dan mendasari perumusan alternatif kebijakan yang menekankan monitoring berbasis data mikro-spasial, indikator *outcome-impact*, dan mekanisme *feedback* untuk memastikan Danais memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bantul.

12) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY dan Kabupaten Bantul

merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat prioritas pembangunan daerah untuk periode tertentu, termasuk sasaran dan indikator kinerja pembangunan. RPJMD seharusnya menjadi kerangka integrasi bagi penggunaan Danais, agar alokasi dan pemanfaatan dana sejalan dengan prioritas pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan.

Dalam konteks analisis kebijakan, RPJMD memungkinkan evaluasi apakah Danais telah terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah, apakah sasaran program telah disusun berbasis *outcome-impact*, dan sejauh mana indikator kinerja dapat digunakan untuk memantau distribusi manfaat Danais ke kelompok miskin dan rentan. Pemahaman terhadap RPJMD ini penting untuk merumuskan alternatif kebijakan yang mendorong tata kelola berbasis hasil, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga Danais tidak hanya fokus pada serapan anggaran, tetapi benar-

benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Bantul.

13) SDGs (*Sustainable Development Goals*)

menjadi acuan global dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, khususnya pada Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), Tujuan 10 (Mengurangi Kesenjangan), dan Tujuan 16 (Institusi yang Kuat). SDGs menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, serta mendorong negara dan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kapasitas institusi publik.

Dalam konteks Danais di Kabupaten Bantul, SDGs menyediakan tolok ukur global untuk menilai apakah penggunaan Danais telah memberikan manfaat nyata bagi kelompok miskin dan rentan, mengurangi kesenjangan pendapatan, dan meningkatkan kapasitas tata kelola serta akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan mengacu pada SDGs, evaluasi Danais dapat menilai integrasi antara kebijakan lokal dan tujuan pembangunan global, sekaligus merumuskan alternatif kebijakan berbasis hasil (*results-based*) yang mendukung pemerataan

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

III. ALTERNATIF KEBIJAKAN

3.1 Alternatif Kebijakan

Berdasarkan analisis problem statement dengan landasan RBM, OECD-DAC, teori keadilan distribusi, Teori Governance dan NPM, SDGs dan regulasi terkait, terdapat tiga alternatif solusi utama untuk orientasi Danais menuju outcome kesejahteraan masyarakat:

Alternatif 1: Optimalisasi regulasi dan indikator. Menekankan penyesuaian regulasi dan indikator kinerja Danais agar berfokus pada outcome dan dampak kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar serapan anggaran. Alternatif ini selaras dengan RPJMN 2020–2024 dan UU Keistimewaan DIY, yang menekankan pembangunan berbasis hasil (Perpres No.18/2020; UU No.13/2012). Implementasinya relatif lebih mudah karena hanya membutuhkan revisi indikator dan dokumen regulasi, meskipun kurang menekankan penguatan kapasitas kelembagaan atau sistem monitoring digital. Dengan demikian, alternatif ini cukup efektif untuk menggeser orientasi Danais dari output fisik ke outcome, namun dampaknya terhadap pemerataan pendapatan bergantung pada konsistensi penerapan indikator tersebut.

Selain itu, penyesuaian regulasi dan indikator juga menciptakan landasan hukum dan pedoman teknis yang lebih jelas bagi perangkat daerah, sehingga pelaksanaan program Danais menjadi lebih terstruktur dan akuntabel. Dengan indikator yang terukur, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi kinerja secara sistematis, membandingkan capaian antar program, dan menilai dampak nyata terhadap masyarakat. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memudahkan pengambilan keputusan berbasis bukti untuk perbaikan program di masa mendatang.

Alternatif 2: Penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas perangkat daerah. Fokus pada peningkatan kapasitas perangkat daerah (PD), koordinasi lintas OPD, pembentukan task force, dan pelatihan SDM. Alternatif ini sejalan dengan prinsip Governance dan New Public Management (NPM) yang menekankan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan publik (Rhodes, 1996; Hood, 1991). Implementasinya lebih kompleks dibanding revisi regulasi karena memerlukan alokasi anggaran tambahan dan komitmen politik tinggi. Namun, alternatif ini efektif untuk meningkatkan koordinasi dan pengawasan dalam pengelolaan Danais, meskipun dampaknya

terhadap pemerataan pendapatan memerlukan waktu lebih lama dan dukungan lintas PD yang konsisten.

Selain itu, penguatan kelembagaan dan koordinasi memungkinkan terbangunnya struktur manajemen yang lebih sistematis dan mekanisme pengambilan keputusan yang jelas antar perangkat daerah. Dengan adanya task force dan peningkatan kapasitas SDM, proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Danais dapat berjalan lebih terintegrasi dan akuntabel. Hal ini juga mendukung terciptanya partisipasi masyarakat yang lebih aktif, sehingga program dapat lebih tepat sasaran dan menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan Danais di mata publik..

Alternatif 3: Pengembangan sistem monitoring berbasis data mikro-spasial dan *feedback loop*. Menekankan pembangunan sistem monitoring berbasis data mikro-spasial, integrasi data lintas perangkat daerah (PD), dan forum evaluasi sebagai mekanisme *feedback loop*. Alternatif ini selaras dengan prinsip Results-Based Management (RBM), SDGs, dan laporan BPK yang menekankan outcome dan transparansi (OECD, 2019; UNDP, 2009; BPK RI, 2021). Meskipun membutuhkan investasi awal besar untuk sistem digital,

SDM ahli, serta integrasi data antar instansi, alternatif ini paling efektif dalam memastikan DanaIS memberikan dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan, karena pengukuran outcome jelas dan terdapat mekanisme perbaikan berkelanjutan.

Selain itu, penerapan sistem monitoring mikro-spasial memungkinkan pemerintah daerah untuk menargetkan program secara lebih tepat berdasarkan kondisi rumah tangga dan wilayah yang paling membutuhkan. Integrasi lintas PD dan forum evaluasi memastikan koordinasi yang lebih baik, meminimalkan duplikasi program, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan DanaIS. Dengan mekanisme feedback loop yang sistematis, setiap hasil evaluasi dapat langsung digunakan untuk menyempurnakan perencanaan dan pelaksanaan program berikutnya, sehingga DanaIS dapat menjadi instrumen strategis untuk pembangunan inklusif, pemerataan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul.

3.1 Pilihan Kebijakan

Evaluasi terhadap alternatif kebijakan dilakukan dengan menggunakan Metode Bardach (2012), yang menekankan pengambilan keputusan berbasis kriteria melalui empat dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, politik, dan kelayakan teknis.

Pendekatan ini memungkinkan setiap alternatif dianalisis secara sistematis untuk menilai sejauh mana mampu menyelesaikan masalah utama terkait efektivitas pengelolaan DanaIS dan pemerataan manfaatnya. Hasil evaluasi kemudian digunakan untuk menentukan satu kebijakan yang paling layak, strategis, dan sesuai dengan kapasitas sumber daya daerah, sehingga dapat direkomendasikan sebagai solusi utama dalam meningkatkan kontribusi DanaIS terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul.

Evaluasi Alternatif Kebijakan Metode

Bardach

Kriteria Evaluasi	Alternatif 1: Regulasi & Indikator Outcome	Alternatif 2: Penguatan Kelembagaan & Koordinasi	Alternatif 3: Monitoring Mikro-Spasial & Feedback
Ekonomi (25%)	Efisien dalam jangka panjang karena anggaran lebih terarah pada dampak kesejahteraan, meski awalnya butuh biaya revisi regulasi. (Skor: 4)	Memerlukan alokasi anggaran tambahan untuk koordinasi, pelatihan, dan kelembagaan baru. (Skor: 3)	Investasi awal besar untuk sistem digital dan SDM, namun efisien dalam jangka panjang karena mengurangi <i>leakage</i> dan duplikasi program. (Skor: 5)
Sosial (25%)	Meningkatkan legitimasi publik karena outcome yang terukur langsung dirasakan	Partisipasi masyarakat meningkat, inklusif bagi kelompok miskin dan	Transparansi tinggi, masyarakat dapat mengakses data distribusi

Kriteria Evaluasi	Alternatif 1: Regulasi & Indikator Outcome	Alternatif 2: Penguatan Kelembagaan & Koordinasi	Alternatif 3: Monitoring Mikro-Spasial & Feedback
	masyarakat. (Skor: 4)	rentan. (Skor: 5)	manfaat secara adil. (Skor: 5)
Politik (25%)	Dukungan kuat dari pemerintah pusat dan daerah karena selaras dengan RPJMN 2020–2024 dan UU Keistimewaan DIY. (Skor: 4)	Perlu komitmen politik tinggi dari lintas perangkat daerah, potensi resistensi birokrasi cukup besar. (Skor: 3)	Membutuhkan dukungan politik untuk digitalisasi dan keterbukaan data, ada potensi resistensi dari pihak yang kehilangan “kontrol informasi”. (Skor: 4)
Kelayakan Teknis (25%)	Mudah diimplementasikan karena hanya perlu penyesuaian indikator dalam dokumen perencanaan dan regulasi. (Skor: 5)	Cukup menantang karena butuh koordinasi lintas OPD dan peningkatan kapasitas kelembagaan. (Skor: 3)	Paling kompleks secara teknis karena butuh infrastruktur digital, SDM ahli, dan integrasi data antar instansi. (Skor: 4)
Total Skor	17/20=85%	14/20=70%	18/20=90%

Berdasarkan evaluasi menggunakan metode Bardach, alternatif kebijakan Monitoring Mikro-Spasial dan Feedback

Loop (Alternatif 3) memperoleh skor tertinggi dengan total 90%, dibandingkan Alternatif 1 (Regulasi dan Indikator Outcome, 85%) dan Alternatif 2 (Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi, 70%). Meskipun membutuhkan investasi awal yang lebih besar dan dukungan teknis yang kompleks, Alternatif 3 paling unggul dalam jangka panjang karena mampu meningkatkan transparansi, mengurangi duplikasi dan kebocoran program, serta memastikan distribusi manfaat Danais yang adil bagi masyarakat miskin dan rentan.

Alternatif 1 relatif mudah diimplementasikan melalui penyesuaian indikator kinerja, namun efektivitasnya masih terbatas tanpa dukungan sistem monitoring yang memadai. Sementara itu, Alternatif 2 meningkatkan koordinasi dan partisipasi masyarakat, tetapi menghadapi tantangan politik dan kapasitas kelembagaan yang lebih tinggi. Dengan demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pembangunan sistem monitoring mikro-spasial dengan mekanisme feedback loop merupakan opsi paling layak untuk menggeser orientasi Danais dari sekadar output fisik menuju outcome kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan metode Bardach, **rekomendasi kebijakan**

utama adalah pembangunan sistem monitoring dan evaluasi Danais berbasis mikro-spasial dengan indikator outcome–impact, yang diatur melalui regulasi turunan. Evaluasi Bardach menunjukkan bahwa alternatif ini memiliki skor tertinggi karena mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran, meningkatkan transparansi, dan memberikan feedback yang berkelanjutan untuk perbaikan kebijakan. Penilaian berdasarkan kriteria DAC memperkuat temuan ini, di mana relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan alternatif ini lebih unggul dibandingkan penguatan regulasi atau kelembagaan semata. Dengan mekanisme integrasi data lintas perangkat daerah dan forum evaluasi, kebijakan ini memastikan Danais tidak hanya berfokus pada output fisik, tetapi benar-benar berkontribusi pada pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan partisipasi publik.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari policy paper ini menegaskan bahwa pengelolaan Danais di Kabupaten Bantul saat ini masih berorientasi pada output fisik dan serapan anggaran, sehingga kontribusinya terhadap

pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat relatif terbatas. Evaluasi mikro dan analisis dampak menunjukkan adanya ketimpangan distribusi manfaat, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta minimnya mekanisme monitoring berbasis data mikro-spasial. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Danais belum sepenuhnya efektif sebagai instrumen pembangunan inklusif yang menekankan pemerataan dan keberlanjutan.

Temuan tersebut menunjukkan perlunya pendekatan berbasis hasil (results-based) yang menekankan indikator outcome–impact. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memonitor dampak nyata Danais terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar mengejar serapan anggaran atau capaian fisik. Dengan indikator yang terukur, kebijakan dapat lebih akurat menargetkan kelompok miskin, rentan, dan wilayah dengan ketimpangan tinggi.

Selain itu, integrasi lintas perangkat daerah menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas Danais. Penguatan koordinasi OPD, pembentukan task force, dan partisipasi masyarakat memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program berjalan secara terpadu. Pendekatan ini juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sehingga setiap keputusan pengelolaan Danais dapat

dipertanggungjawabkan secara jelas kepada publik.

Penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data mikro-spasial, disertai regulasi turunan dan forum evaluasi sebagai feedback loop, menjadi langkah strategis berikutnya. Sistem ini akan menggeser fokus pengelolaan Danais dari sekadar output fisik menjadi instrumen strategis untuk pertumbuhan inklusif, pemerataan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul. Dengan demikian, Danais dapat benar-benar menjadi alat pembangunan yang efektif, berkelanjutan, dan pro-rakyat.

4.2 Rekomendasi Kebijakan

Sebagai respons terhadap temuan tersebut, *policy paper* merekomendasikan **penerapan sistem monitoring dan evaluasi Danais berbasis mikro-spasial dengan indikator outcome-impact, yang diatur melalui regulasi turunan dan didukung forum evaluasi serta integrasi data lintas PD.** Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Bappeda DIY dan Bappeda Bantul sebagai koordinator utama, dengan dukungan perangkat daerah teknis terkait, perlu menetapkan dan menerapkan sistem monitoring dan evaluasi Danais berbasis mikro-spasial dengan indikator outcome-

impact yang diatur melalui regulasi turunan. Kebijakan ini harus mengatur secara jelas siapa yang bertanggung jawab, mekanisme pelaksanaan, dan tahapan pengukuran dampak, sehingga alokasi Danais tidak hanya terfokus pada serapan anggaran atau output fisik, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan.

Pelaksanaan kebijakan meliputi: 1) integrasi data penerima manfaat dari semua perangkat daerah terkait untuk memastikan distribusi Danais tepat sasaran; 2) pembentukan forum evaluasi sebagai mekanisme feedback untuk memperbaiki perencanaan dan implementasi program secara berkala; 3) pengembangan kapasitas aparatur dalam mengelola data mikro-spasial dan menginterpretasikan indikator outcome-impact; serta 4) pemantauan dan pelaporan rutin yang transparan untuk masyarakat dan pengambil keputusan. Dengan pendekatan ini, pengelolaan Danais akan bergeser menjadi instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan inklusif, pemerataan pendapatan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, sekaligus memperkuat akuntabilitas, partisipasi publik, dan keberlanjutan program sesuai prinsip Results-Based

Management (RBM) dan kriteria evaluasi OECD-DAC.

Tabel implementasi rekomendasi kebijakan Danais

Tahapan Implementasi	Kegiatan/Keterangan	Penanggung Jawab	Indikator Keberhasilan
1. Integrasi Data Mikro-Spasial	Mengumpulkan, memverifikasi, dan menyatukan data penerima Danais dari seluruh perangkat daerah	Bappeda Bantul & PD Teknis terkait	Tersedianya basis data tunggal yang lengkap, akurat, dan terupdate
2. Penetapan Indikator Outcome-Impact	Menetapkan indikator berbasis hasil (misal: peningkatan pendapatan, akses layanan, inklusi sosial)	Bappeda DIY & Bappeda Bantul	Tersedianya daftar indikator outcome-impact yang terukur dan disetujui
3. Forum Evaluasi & Feedback Loop	Menyelenggarakan forum rutin lintas perangkat daerah untuk menilai progres dan memberikan masukan	Bappeda DIY & Bappeda Bantul	Terselenggara forum evaluasi minimal setiap semester dengan laporan rekomendasi
4. Penguatan Kapasitas SDM	Pelatihan staf terkait monitoring, analisis data, dan interpretasi indikator outcome-impact	Bappeda DIY & Bappeda Bantul	Minimal 80% staf terlatih dan mampu mengelola sistem monitoring berbasis data mikro-spasial
5. Pemantauan & Pelaporan Transparan	Menyusun laporan berkala yang dapat diakses publik dan pengambil keputusan, menampilkan pencapaian outcome	Bappeda Bantul & PD Teknis terkait	Laporan publik dan internal tersedia setiap semester, lengkap dengan rekomendasi tindak lanjut
6. Regulasi Turunan & Penguatan Kebijakan	Menyusun regulasi yang mengatur indikator outcome-impact, mekanisme integrasi data, dan forum evaluasi	Pemda DIY (Gubernur)	Terbitnya regulasi turunan yang resmi mengatur sistem monitoring dan evaluasi Danais

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bardach, E. (2012). A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving (4th ed.). CQ Press.
- [2] Bappeda Bantul. (2022). Laporan Evaluasi Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul Tahun 2022. Bantul: Bappeda Bantul.
- [3] Bappeda DIY. (2022). Dokumen Evaluasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022. Yogyakarta: Bappeda DIY.
- [4] Bappenas. (2021). Evaluasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- [5] BPK RI. (2021). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- [6] Budimantoro, C., & Supriyanto. (–). Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kontribusinya untuk Masyarakat. Iripia: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan. Diakses dari ejournal.irpia.or.id. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan Realisasi dan Evaluasi Transfer ke Daerah 2023. Jakarta: Kemenkeu RI.
- [7] Hardiansyah. (2021). Evaluasi Pemanfaatan Dana Keistimewaan dalam Program Pengembangan Warisan Budaya Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2019 (Tesis Sarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). Diakses dari etd.umy.ac.id.
- [8] OECD. (2019). Results-Based Management in Development Co-operation: Review of Experience. Paris: OECD Publishing.
- [9] Peraturan Gubernur DIY Nomor 115 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY.
- [10] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- [11] Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

- [12] Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di DIY (2013–2018). *Kajian Bisnis*, 28(1), 89–105. <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.45>
- [13] Sakir. (–). Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Governance and Public Policy*. Diakses dari text-id.123dok.com.
- [14] Sekar Arum, H. F., Wijaya, S. R., & Abipraya, F. A. (2021). Pengaruh Dana Keistimewaan Yogyakarta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bantul. *Politikom Indonesiana*, 6(1), 62–82. <https://doi.org/10.35706/jpi.v6i1.5329>
- [15] Sulaiman, A. A. (2023). Literature Review: Study of the Effect of Distributive Justice on Employee Performance. *Asian Journal of Management Analytics*, 3(2), 353–366
- [16] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- [17] UNDP. (2009). *Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results*. New York: United Nations Development Programme.
- [18] Waskito, I. T. (2021). Pengaruh Dana Keistimewaan DIY terhadap Dinamika Tata Kelola Komunitas Kesenian Lokal Taruno Budoyo dan Krido Budoyo (Skripsi, Universitas Gadjah Mada). Diakses dari etd.repository.ugm.ac.id